

ABSTRAK

Salah satu sarana untuk mewujudkan pembangunan dalam bidang ekonomi suatu Negara adalah adanya peran serta lembaga keuangan yang mengatur tatanan sistem ekonomi. Semua sektor yang berkaitan dengan kegiatan keuangan membutuhkan jasa bank. Akan tetapi, masih sering terjadi kelalaian bank dalam hal melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam menjaga keamanan dan menyimpan dana masyarakat yang mempercayakannya. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan perbankan di Indonesia, yaitu Undang- Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan OJK, dan peraturan-peraturan lainnya.

Sebagai alternatif investasi yang kini banyak dilirik oleh masyarakat, Reksa Dana juga mempercayakan dananya kepada Bank. Jika Bank dalam melakukan kegiatannya terjadi kesalahan atau melakukan kecurangan akan menimbulkan kerugian bagi manajer investasi maupun investor. Oleh karena itu, perbankan yang terpercaya dan sehat dalam menjalankan hubungan kemitraan antara nasabah dan bank, kegiatan perbankan harus dilandasi beberapa prinsip umum perbankan, yaitu prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, dan prinsip mengenal nasabah.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan dengan analisis data menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan kasus putusan Nomor 1955/K/Pdt/2017, Bank Mega telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar ketentuan-ketentuan pasal yang ada dalam UU Perbankan, PBI, dan POJK karena Bank Mega telah lalai dalam menerapkan prinsip kepercayaan maupun transparansi informasi kepada nasabahnya. Perbuatan Bank Mega juga bertentangan dengan Fungsi Bank yakni menyimpan dan menjaga keamanan atau menjamin dana yang disimpan oleh masyarakat. Akibat hal tersebut, dana deposito milik Reksa Dana PT. Harvestindo Asset Management tidak diketahui keberadaannya. Ketika dimintakan pertanggungjawaban, Bank Mega juga kurang menunjukkan itikad baiknya dalam hal ganti kerugian.

Kesimpulannya adalah, sebagai lembaga keuangan yang berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sudah seharusnya Bank mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh nasabah guna menunjang tujuan pembangunan nasional yang baik.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Reksa Dana, Tanggung Jawab Bank

ABSTRACT

One of the means to realize development in the economic field of a country is the participation of financial institutions that regulate the economic system. All sectors related to financial activities require bank services. However, bank negligence often occurs in terms of carrying out its functions and duties in maintaining security and saving public funds that entrust it. In this regard, there are several laws and regulations governing the implementation of banking in Indonesia, namely Act Number 10 of the year 1998 concerning Amendments to Act Number 7 of the year 1992 concerning Banking, Act Number 21 of the year 2011 concerning the Financial Services Authority, Act Number 8 of the year 1995 concerning Capital Markets, OJK Regulations, and other regulations.

As an alternative investment that is now being looked by many people, Mutual Funds also entrust their funds to the Bank. If the Bank in carrying out its activities there is an error or committing fraud will cause losses to investment managers and investors. Therefore, a reliable and sound banking system in carrying out partnership relations between customers and banks, banking activities must be based on several general banking principles, namely the principle of trust, the principle of prudence, the principle of confidentiality, and the principle of knowing customers.

The method used is normative juridical with descriptive analytical research specifications. The types and sources of data used are secondary data which includes primary law, secondary law, and tertiary law. Data collection techniques carried out are library research by analyzing data using qualitative methods.

Based on the case number 1955 / K / Pdt / 2017, Bank Mega has committed acts against the law and violated the provisions of the articles in the Banking Law, PBI, and POJK because Bank Mega has neglected to apply the principle of trust and transparency of information to its customers. Bank Mega's actions also conflict with the Bank's function of storing and maintaining security or guaranteeing funds held by the public. As a result of this, there is no known whereabouts owned by PT. Harvestindo Asset Management's Mutual Funds. When asked for accountability, Bank Mega also showed no good faith in terms of compensation.

The conclusion is, as a financial institution that acts as a collector and distributor of public funds, the Bank should comply with applicable laws and regulations and also be responsible for losses suffered by customers to support good national development goals.

Keywords: Unlawful Acts, Mutual Funds, Bank Responsibilities